

POLITIK GULA MERAH

Rizca Yunike Putri^{1*}

¹Universitas Wijaya Kusuma

Abstrak

Penelitian ini mencoba melakukan riset pengembangan kapasitas UKM pada pemerintah daerah yang baik pada kluster ekonomi gula merah di Jawa Timur, khususnya di industri gula merah Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Latar belakang pengembangan kapasitas UKM dalam kasus pemerintah daerah yang baik kluster ekonomi akan dapat meningkatkan kapasitas bisnis ekonomi jika dilakukan secara sinergis dan tidak hanya mendukung pengembangan daerah yang memiliki bisnis serupa, tetapi juga sinergi dalam upaya kelembagaan untuk bekerja bersama untuk bersama-sama menghadapi dan memecahkan masalah yang dihadapi oleh bisnis ekonomi di kawasan bisnis ekonomi tertentu. Koperasi dianggap sebagai solusi bagi koperasi, masalah-masalah perusahaan ekonomi yang tadinya dihadapi sendiri atau dalam kelompok kecil akan mudah jika dihadapi dan dipecahkan bersama dalam bentuk perusahaan ekonomi koperasi yang secara bersama-sama didirikan oleh pengusaha kecil di kluster ekonomi UKM gula merah. Sebagai studi eksplorasi dengan pendekatan kualitatif yang berguna untuk menjelaskan hubungan timbal balik, mengatur perubahan, membandingkannya, dan menilai efektivitas suatu kebijakan atau program. Output dari penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kapasitas penelitian UKM. Hasil yang diperoleh dianalisis menggunakan metode kualitatif untuk memperoleh gambaran potensi pembentukan koperasi untuk pengembangan kapasitas kelembagaan (capacity building) koperasi berbasis ekonomi kluster di Jawa Timur, terutama pada kluster ekonomi gula merah dan kemudian dijadikan rekomendasi kebijakan sebagai upaya untuk pemberdayaan UKM gula merah melalui pengembangan lembaga koperasi.

Kata kunci: gula merah, implementasi, kebijakan, kluster UKM, pembangunan sosial

Abstract

This study try to conduct the research of UKM capacity development in good local government on economic clusters of brown sugar in East Java, especially in the palm sugar industry Kediri regency, East Java. Background of UKM capacity development in good local government case economic clusters will be able to increase the business capacity of the economy if done in synergy and not only support the development of the region which has a similar business, but also the synergies in institutional efforts to work together to jointly face and solve the problems faced by businesses economies in the region specific economic business clusters. Cooperatives are considered as a solution for the cooperatives, the problems of economic enterprises that had faced alone or in small groups would easily if faced and solved together in the form of cooperative economic enterprise jointly established by the small entrepreneurs in the economic clusters of UKM palm sugar. As an exploratory study with a qualitative approach that is useful for explaining the relationship of reciprocity, set changes, compare them, and to assess the effectiveness of a policy or program. The output of this study is aimed at developing research capacity of UKM. The results obtained were analyzed using qualitative method to obtain depiction potential establishment of cooperatives for the development of institutional capacity (capacity building) cooperative based on cluster economies in East Java, especially on a cluster palm sugar economy and then made the policy recommendation as an effort to empowerment UKM brown sugar through the development of cooperative institutions.

Keywords: implementation, palm sugar, policy, social development, UKM cluster

PENDAHULUAN

Pengembangan UKM dan koperasi di Indonesia, setidaknya bisa menilai dari kebijakan pengembangan empat level. Kebijakan pengembangan UKM dan koperasi dapat dibagi menjadi empat level, yaitu level meta, level makro, level meso dan level mikro. Pada level meta, kemauan politik para pendiri republik ini telah mendukung landasan Undang-Undang yang jelas dan tegas bagi koperasi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 UUD 1945 dan penjelasannya, lebih lanjut diperkuat oleh Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang

Koperasi (1), dan Undang-Undang No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil (2).

Pengembangan kapasitas UKM di pemerintahan daerah yang baik dalam hal kluster ekonomi dapat meningkatkan kapasitas kegiatan ekonomi jika bersinergi mendukung pengembangan daerah (3).

Alamat Korespondensi Penulis:

Rizca Yunike Putri,

Email : Rizca@gmail.com

Alamat : Universitas Wijaya Kusuma

Koperasi dianggap sebagai solusi bersama yang didirikan oleh para pengusaha kecil di kluster ekonomi UKM gula merah.

Studi terhadap kluster UKM di Eropa Barat, setidaknya menunjukkan bahwa ada sejumlah faktor (4), yang membuat mereka mampu berkembang baik, antara lain: (1) Di pusat juga ada pemasok bahan baku, peralatan produksi, mesin, dan komponen, sub-kontraktor, dan produsen barang jadi. Selain mengurangi biaya produksi, bekerja dalam sinergi satu sama lain, memfasilitasi hubungan bisnis di antara mereka; (2) adanya kombinasi kompetisi yang ketat di satu sisi, dan kerjasama yang baik di sisi lain, di antara sesama UKM. Dengan demikian menciptakan tingkat efisiensi kolektif (efisiensi kolektif) tinggi; (3) Dalam kelompok ini, ada pusat layanan, terutama yang disediakan oleh pemerintah daerah, yang dapat digunakan secara kolektif oleh semua pengusaha yang ada di sana; (4) UKM di kluster menjadi sangat fleksibel dalam menghadapi perubahan di pasar, di mana ia telah menciptakan jaringan yang baik, dan inovasi cerdas.(5)

Berdasarkan catatan berbagai lembaga yang disusun Tim Studi JICA (2002), saat ini setidaknya terdapat 9.800 unit pusat UKM dengan tingkat pengembangan tingkat keterkaitan dalam gugusan yang umumnya masih rendah.(6) Jumlah unit UKM yang diamati di pusat sebagai kelompok embrionik diperkirakan sekitar 475.000. dilihat dari distribusi sekitar 58% yang terpusat di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

Dalam penelitian ini digunakan perspektif pengembangan kelembagaan atau yang biasa dikenal dengan pengembangan kapasitas kelembagaan (*capacity building*). Namun tetap memperhatikan berbagai aspek yang mempengaruhi pengembangan UMKM seperti kapasitas modal usaha, kapasitas manajer sumber daya manusia, kapasitas manajemen bisnis, kapasitas jaringan dan pemasaran bahan baku serta faktor eksternal seperti iklim bisnis dan dukungan kebijakan pemerintah.(7)

Kebijakan pada level makro akan menentukan apakah sistem yang dijalankan kondusif dan mendukung kondisi ekonomi linear dengan pengembangan UKM dan koperasi. Kebijakan di tingkat makro akan menentukan struktur dan tingkat persaingan pasar yang dihadapi oleh pengusaha termasuk UKM dan koperasi.(8) Tugas pemerintah (pusat dan daerah) untuk menumbuhkan iklim usaha yang kondusif bagi UKM dan koperasi, dalam arti UKM dan koperasi

telah berupaya membuka peluang dan beban yang sama dibandingkan dengan usaha lain secara proporsional.(9)

Prioritas mendesak untuk pendekatan pemerintah Indonesia dalam pengembangan UKM dan koperasi adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi sektor swasta untuk bergerak dan tumbuh. Dengan demikian, perlu untuk mereformasi lingkungan otoritas formal di mana perusahaan beroperasi, kebijakan terkait bisnis dan peraturan yang sesuai. Dalam konteks pengembangan UKM dan koperasi, tantangan utama bagi pemerintah mana pun, termasuk pemerintah Indonesia, adalah untuk menentukan apa perannya dalam mengembangkan pasar bagi UKM dan koperasi secara efektif.(10)

Hasil langsung terlihat dari rendahnya tingkat teknologi dan struktur pekerjaan, seperti yang ditunjukkan oleh keragaman nilai tambah kluster UKM yang hanya mencapai Rp 1 miliar atau lebih rendah dari industri dalam negeri yaitu 1,2 miliar. Sementara industri kecil di luar kluster mencapai 2,9 miliar atau 2 kali lebih besar. Produktivitas yang rendah dari kluster ini juga terjadi di semua sektor ekonomi. Dengan demikian kondisi kluster yang ada secara umum dapat diklasifikasikan menjadi tiga tahap pengembangan sesuai dengan produktivitas tenaga kerja dan penggunaan teknologi adalah teknologi yang memiliki produktivitas rendah/upah minimum tenaga kerja (UMR) Rp970.000. UMR di tingkat teknologi menengah Rp2,055 juta, serta teknologi tinggi Rp8,24 juta.

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah: "Bagaimana pengembangan peningkatan kapasitas UKM di pemerintah daerah yang baik dalam kasus kluster ekonomi gula merah di Jawa Timur?" Penelitian ini berguna untuk menyusun strategi dan konsep kapasitas pengembangan Rekomendasi kebijakan UKM di pemerintah daerah yang baik tentang kelompok ekonomi gula merah di Jawa Timur.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan bentuk masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai penelitian eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian eksploratif, adalah salah satu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menguji sesuatu (minat) tidak diketahui, tidak mampu dipahami, atau tidak dikenali dan/namun bermanfaat untuk menjelaskan keterkaitan, menetapkan perubahan keputusan ke masa depan, membandingkan kondisi, dan menilai efektivitas

kebijakan/program. Kegiatan ini dilakukan pada pengembangan kapasitas penelitian UKM di pemerintah daerah yang baik pada kluster ekonomi gula merah di Jawa Timur terkait dengan kluster industri gula merah di Kediri, tepatnya di Kecamatan Ngadiluwih dan Kandat.

Data dikumpulkan dengan cara dokumentasi, observasi dan wawancara. Dalam studi ini, data primer diperoleh melalui serangkaian wawancara baik dengan pejabat, informan kunci, dan pengusaha informan yang melakukan wawancara mendalam dengan penanya perangkat Anda dan FGD terbatas yang dilakukan langsung di lokasi usaha koperasi dijalankan.

Hasil yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif untuk memperoleh gambaran potensi pembentukan koperasi untuk pengembangan kapasitas kelembagaan (capacity building) koperasi berbasis ekonomi kluster di Jawa Timur, terutama pada kluster ekonomi gula merah dan kemudian melayani rekomendasi kebijakan sebagai upaya untuk memberdayakan UKM gula merah melalui pengembangan lembaga koperasi. Validitas data adalah kegiatan yang dilakukan sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan di semua bidang.

Pembahasan

Kebijakan Kluster UKM

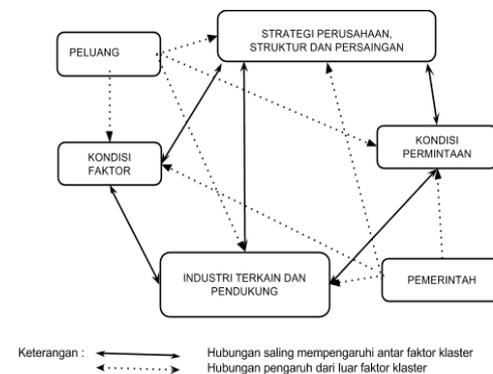
Jumlah UKM hingga 2011 mencapai sekitar 52 juta. Keberadaan UKM di Indonesia sangat penting bagi perekonomian karena menyumbang sekitar 60% dari PDB dan menyumbang lapangan kerja sebesar 97% dari keseluruhan jumlah total tenaga kerja. Namun akses ke lembaga keuangan formal terbatas hanya 25% atau 13 juta pelaku UKM yang memiliki akses ke lembaga keuangan. Pemerintah Indonesia, mengembangkan UKM melalui Departemen Koperasi dan UKM, di setiap provinsi atau kabupaten/kota.

Menurut UU No. 25 tahun 1992 Pasal 4 menjelaskan bahwa koperasi memiliki fungsi dan peran antara lain untuk mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi dan masyarakat melalui anggotanya, berupaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia, memperkuat ekonomi rakyat, mengembangkan ekonomi nasional, serta mengembangkan kreativitas dan organisasi semangat untuk siswa.

Dari pengalaman di beberapa negara seperti Italia, Chili, dan India, strategi yang diupayakan untuk meningkatkan produktivitas koperasi adalah pendekatan kluster. Kluster adalah konsentrasi geografis perusahaan dan institusi

yang saling berhubungan dalam sektor tertentu. Kluster mendorong industri untuk saling bersaing, untuk menciptakan daya saing bisnis yang sehat. Ada empat faktor yang saling terkait: (1) Faktor Kondisi/Input, (2) Kondisi permintaan, (3) Strategi Perusahaan, struktur dan kegunaan, dan (4) Industri Terkait dan pendukung. Selain itu ada pengaruh pemerintah dan peluang berubah. Penciptaan daya saing dijelaskan dalam model Daya Saing Berlian (Diamond of Competitiveness).

Dari Gambar di bawah ini, ada empat faktor yang ditambahkan untuk melengkapi empat faktor yaitu faktor manusia, yang terdiri dari pekerja, politisi dan birokrat, profesional, pengusaha.



Gambar 1. Model Daya Saing Berlian (Porter 1998)

Perspektif ekonomi dalam kluster dimulai dengan karya Marshal (1920) yang merupakan salah satu pemikiran dasar yang menjelaskan bahwa pusat-pusat industri/industri yang terpusat berdasarkan out-put usaha mampu meningkatkan daya saing pelaku usaha melalui beberapa mekanisme, yaitu: (1) mengumpulkan pekerja dengan spesifikasi khusus yang relevan dengan kebutuhan industri (2) ketersediaan bahan baku dan fasilitas pendukung industri, dan (3) penyebaran inovasi. Konsep ini juga menyoroti pentingnya eksternalitas dalam pembangunan yang akan membantu memberikan pemahaman yang lebih praktis tentang manfaat kluster yang dihasilkan. Karena kluster diakui sebagai pendekatan yang efektif dalam meningkatkan kinerja perusahaan, kinerja industri dan kinerja daerah serta negara, para ahli berusaha mengidentifikasi faktor penentu dalam pengembangan kluster. Dalam kelompok teori pusat-pusat industri, ada model pengembangan kluster. Karakteristik kesesuaian objek studi antara pusat-pusat UKM di Indonesia

dan Italia dipertimbangkan dalam penggunaan model tersebut dalam menganalisis dinamika kluster UKM.

Model kluster secara sistematis mengidentifikasi tiga faktor mendasar yang mempengaruhi pengembangan kluster yaitu efisiensi kolektif, kebijakan stimulasi (bujukan kebijakan), dan modal sosial (modal sosial). Faktor pertama, efisiensi bersama dalam kelompok, efisiensi kolektif mengadopsi kerangka kerja yang telah dikembangkan sebelumnya. Dalam perkembangan lebih lanjut konsep efisiensi kolektif digunakan dalam skala besar untuk menganalisis perkembangan kluster, terutama di negara-negara berkembang atau negara-negara dengan pendapatan rendah (negara berpenghasilan rendah).

Bentuk pertama dari efisiensi kolektif adalah manfaat ekonomi yang pasif dan dapat berbentuk biaya transaksi yang lebih rendah, penyebaran informasi pasar dan teknologi informasi. Bentuk lain dari efisiensi kolektif adalah manfaat dari tindakan kolektif. Aksi bersama dapat berupa kerja sama nyata antara sesama produsen atau kerja sama antara produsen dan pemasok, distributor, lembaga keuangan, dan lembaga pendukung lainnya. Intinya, aksi bersama ini akan mempromosikan pembentukan kluster sebagai keseluruhan produksi untuk bergabung dengan industri baru dari industri hulu atau hilir dalam satu rantai (rantai nilai). Faktor kedua adalah kebijakan stimulus pemerintah. Keberhasilan kluster untuk berkembang menjadi kluster yang dinamis tidak cukup hanya didasarkan pada pemenuhan motif ekonomi (efisiensi bersama) pelaku, tetapi juga didukung oleh kebijakan stimulus pemerintah.

Karakteristik Pengolahan Gula Merah UKM dan Masalah Produksi

Sebagian besar keberadaan UKM gula merah untuk membentuk (kembali) dan memelihara koperasi suatu kegiatan padat karya. Semua kegiatan yang berkaitan dengan koperasi akan ditangani oleh rapat anggota. Dalam peraturan Menteri Koperasi dan UKM R.I No. 22 / PER / M.KUKM / IV / 2007 tentang Pedoman Penilaian Koperasi, keberhasilan koperasi diukur sejauh mana peran anggota dalam pelaksanaan usaha koperasi.

Konteks Desa Slumbung (Kecamatan Ngadiluwih) dan beberapa desa di Kecamatan Kandat, mayoritas pendidikan pengrajin gula merah di desa ini rata-rata adalah sekolah menengah pertama (SMP). Dengan tingkat

pendidikan sekolah menengah ini, peneliti percaya bahwa mereka tidak pernah mendapatkan materi sepenuhnya dan jelas tentang koperasi di masa sekolah. Dengan kurangnya penyediaan pengetahuan tentang koperasi, peneliti menemukan bahwa kebanyakan mereka tidak mengerti tentang pengoperasionalan koperasi. Kemungkinan besar mereka belum pernah membaca aturan Menkop dan UKM. Jika argumen ini benar, maka sebenarnya harus ada upaya untuk memberikan pemahaman kepada mereka tentang koperasi.

Ada tujuh masalah yang dihadapi oleh pembuat gula merah di Kediri. Masalah pertama adalah produksi gula merah membutuhkan bahan baku tebu. Produksi gula merah sangat tergantung pada kualitas tebu. Kualitas gula merah sangat dipengaruhi oleh bahan baku, kegiatan pasca panen dan kegiatan pengolahan. Masalah-masalah ini terjadi pada hasil bahan baku. Masalah kedua dalam proses produksi gula merah termasuk penggilingan dan memasak. Masalah ketiga yaitu tenaga kerja, yaitu individu yang memindahkan proses produksi gula merah Slumbung dari desa dan desa-desa sekitarnya. Masalah perburuhan terletak pada seorang pekerja perorangan dan pemilik pabrik. Masalah keempat adalah pemasaran, masing-masing sendiri. Mereka bisa menjualnya kepada siapa saja asalkan menguntungkan. Namun ada masalah pada pengrajin ceplik gula. Masalah kelima yaitu masalah modal. Pengrajin gula merah menggunakan banyak sumber modal untuk memenuhi kebutuhan modal dari modal investasi dan modal yang diambil. Sumber bisa dari modal sendiri, modal berasal dari pedagang besar. Masalah keenam adalah ketimpangan sosial. Menurut kepala desa, di desa Slumbung telah terjadi kesenjangan sosial antara pemilik gula industri dengan masyarakat setempat. Masalah terakhir adalah kurangnya kebijakan pemerintah yang tepat. Kekurangan pupuk yang berdampak pada industri gula merah juga mengganggu pengrajin gula merah.

Pengembangan Koperasi Gula Merah

Dalam analisis SWOT ditemukan bahwa kekuatan industri gula merah adalah: (1) Pengalaman Panjang (2) pasar yang jelas (3) Ketersediaan bahan baku berlimpah dan (4) Mekanisasi produksi. Kelemahan internal yang diidentifikasi meliputi (1) Pendidikan rendah, (2) fluktuasi kualitas bahan baku, (3) Manajerial lemah, (4) tidak memiliki lisensi, dan (5) Modal lemah.

Matrik SWOT OF PALM SUGAR	
Internal strength (Score 4)	Internal weakness (score 5)
1) Long experience.	Low education.
2) The market is clear.	1) Fluctuations in the quality of raw materials
3) Availability of raw materials.	2) Managerial weak.
4) Mechanization of production.	3) Do not have a license.
	4) Capital Stock weak.
Opportunity (Score 2)	Threats and challenges (Score 5)
1) The market is vast.	1) the license is slow.
2) Hope to improve the quality of raw materials.	2) The products of competitors.
	3) Scarcity of fertilizer.
	4) The social gap.
	5) Fluctuations in demand.

Tabel 1 Matrik SWOT

Matrik SWOT OF PALM SUGAR

Internal strength (Score 4) Internal weakness (score 5)

- 1) Long experience.
- 2) The market is clear.
- 3) Availability of raw materials.
- 4) Mechanization of production. Low education.

- 1) Fluctuations in the quality of raw materials
- 2) Managerial weak.
- 3) Do not have a license.
- 4) Capital Stock weak.

Opportunity (Score 2) Threats and challenges (Score 5)

- 1) The market is vast.
- 2) Hope to improve the quality of raw materials.
 - 1) the license is slow.
 - 2) The products of competitors.
 - 3) Scarcity of fertilizer.
 - 4) The social gap.
 - 5) Fluctuations in demand.

Sumber : Hasil Analisis

KESIMPULAN

Rekomendasi kebijakan yang harus dilaksanakan oleh dewan pemerintahan desa di Kecamatan Kandat dan Ngadiluwih adalah: 1) memfasilitasi upaya pengembangan lembaga koperasi melalui ketersediaan fasilitas; 2)

memberikan sosialisasi kepada masyarakat khususnya yang terlibat dalam usaha ekonomi gula merah di tingkat lokal; 3) untuk memfasilitasi dukungan kelembagaan dengan menjadi pelatih atau penasihat lembaga koperasi yang dikembangkan; 4) pemerintah kecamatan untuk memfasilitasi kemudahan perizinan, akses fasilitas dalam pemasaran, kerjasama fasilitas bisnis dengan perusahaan ekonomi lainnya melalui pameran dan kunjungan kerja.

Bagi Pemerintah Kota Kediri, jajaran Pemerintah Kota Kediri terkait seperti Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Dinas Tenaga Kerja, Bappeda dan yang relevan lainnya harus memfasilitasi kebijakan yang mampu mendukung pengembangan kluster, antara lain: 1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan memfasilitasi kebijakan fasilitas tersebut bekerja sama dengan pelaku ekonomi lain untuk meningkatkan kapasitas produksi; 2) Dinas Koperasi menyediakan fasilitas perizinan, bimbingan dan bantuan; 3) Dinas Tenaga Kerja harus memfasilitasi upaya untuk meningkatkan keterampilan pekerja dan peningkatan manajemen bisnis untuk pemilik bisnis serta SDMnya; 4) Bappeda Kediri perlu memberikan penekanan kebijakan pada tata ruang dan pemanfaatan ruang usaha.

Bahwa, rekomendasi kebijakan untuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur: 1) Memberikan dukungan kepada pemerintah Kabupaten Kediri untuk mengembangkan kapasitas bisnis ekonomi dan kapasitas kelembagaan koperasi dengan kebijakan yang sinergis; 2) Dinas Koperasi dan UKM di Jawa Timur, kluster ekonomi gula merah adalah potensi besar untuk pengembangan koperasi secara profesional baik pengembangan ekonomi dan kelembagaan mereka; 3) dukungan kelembagaan untuk mendorong terciptanya pengelolaan yang handal, keanggotaan produktif, kompetitif, dan manajemen bisnis profesional.

Terakhir untuk rekomendasi kebijakan Pemerintah Pusat yang dapat dilakukan adalah memberikan peraturan yang mendukung pengembangan dan pemberdayaan UKM dan koperasi kompetitif dan profesional melalui kebijakan afirmatif untuk mendukung peningkatan kapasitas UKM dan koperasi dalam persaingan di tingkat global.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Prof. Dr. Budi Prasetyo, M.SI (alm.) atas kesempatan *joint research*, dan kepada ketua UKM serta IKM Koperasi Gula Merah di Kabupaten Kediri.

DAFTAR PUSTAKA

1. Perdagangan K. Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. 25 Indonesia; 2011.
2. Perdagangan K. Undang-Undang No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil. 9 1995.
3. UKM KNK dan. Pembinaan Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Kelembagaan Koperasi. Jakarta; 2007.
4. Munkner HH. Hukum Koperasi. Bandung: Alumni Bandung; 1982.
5. Nation U. Guidance on Good Practices in Corporate Governance Disclosure. New York: Geneva; 2006.
6. Birchall J. Co-operative Principles Ten Years On. ICA Gen Assem. 2005;2(98):45–63.
7. Indonesia R. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor: 4 Tahun 1994, Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Pembubaran Anggaran Dasar Koperasi. Jakarta; 2007.
8. Indonesia R. Peraturan Menteri Nomor 22 tahun 2007 Tentang Pedoman Peningkatan Koperasi. 22/PER/M.KUKM/IV/2007.
9. Soedjono I. Jatidiri Koperasi & Nilai Ekonomi Islam untuk Keadilan Ekoonomi. Jakarta: LSP21; 2003.
10. Sudjarmono J. be G2C. Jakarta: Elexindo Media; 2004.